



# OPTIMALISASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU PADA DOKUMEN ADMINISTRASI DESA DI DESA NAGA TIMBUL

Arini Vika Sari<sup>1)\*</sup>, Sofyan Pariyasto<sup>2)</sup>, Nurin Natiqoh Lubis<sup>3)</sup>, Ikwan Lubis<sup>4)</sup>, A M Hatuaon Sihite<sup>5)</sup>,  
Ridwan syahputra<sup>6)</sup>, Rachel Yoan Katherin Putri br. Siahaan<sup>7)</sup>

<sup>1)3)4)5)</sup>Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

<sup>2)</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Sejati, Medan, Indonesia

<sup>6)</sup>Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>7)</sup>Akademi Informatika dan Komputer Medikom, Medan, Indonesia

\*arinivika1@gmail.com

**Dimasukkan** : 4 Mei 2026 | **Diterima** : 19 Mei 2026 | **Diterbitkan** : 30 Juni 2026

**Abstrak:** Kualitas bahasa dalam dokumen administrasi pemerintahan desa merupakan indikator penting profesionalisme dan tata kelola publik yang akuntabel. Namun, berbagai dokumen administrasi desa masih mengandung kesalahan ejaan, ketidaktepatan diksi, dan penyusunan kalimat yang kurang efektif sehingga berpotensi memengaruhi kejelasan informasi dalam pelayanan administrasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia baku sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam penyusunan dokumen administrasi di Desa Naga Timbul. Kegiatan diikuti oleh 22 aparatur desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, sosialisasi kaidah kebahasaan, diskusi partisipatif, praktik revisi dokumen, dan pendampingan penyusunan dokumen administrasi. Dokumen yang direvisi meliputi surat keterangan, surat undangan, dan berita acara. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui analisis komparatif terhadap dokumen sebelum dan sesudah pendampingan berdasarkan aspek ejaan, diksi, dan kalimat efektif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya penurunan jumlah kesalahan kebahasaan dari 79 kesalahan menjadi 27 kesalahan atau menurun sebesar 65,8%. Penurunan kesalahan terjadi pada seluruh aspek, terutama pada penggunaan ejaan dan penyusunan kalimat efektif. Selain itu, praktik revisi dokumen memberikan pengalaman aplikatif bagi aparatur desa dalam menerapkan bahasa Indonesia baku pada administrasi pemerintahan desa. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap penguatan kualitas administrasi desa yang lebih sistematis, formal, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku.

**Kata Kunci:** bahasa Indonesia baku; administrasi desa; dokumen desa

**Abstract:** *The quality of language in village government administrative documents is an important indicator of professionalism and accountable public governance. However, various village administrative documents still contain spelling errors, inaccurate diction, and ineffective sentence construction, potentially affecting the clarity of information in administrative services. This community service activity aims to optimize the use of standard Indonesian language according to the Enhanced Spelling System (EYD) in*





*the preparation of administrative documents in Naga Timbul Village. The activity was attended by 22 village officials consisting of the village head, village secretary, head of affairs, head of sections, and head of hamlet. The implementation method included initial observation, socialization of language rules, participatory discussions, document revision practices, and assistance in preparing administrative documents. The revised documents included letters of information, invitations, and minutes. The activity evaluation was conducted through a comparative analysis of documents before and after the assistance based on aspects of spelling, diction, and effective sentences. The results of the activity showed a decrease in the number of linguistic errors from 79 to 27 errors, a decrease of 65.8%. The decrease in errors occurred in all aspects, especially in the use of spelling and effective sentence construction. Furthermore, the document revision practice provided village officials with practical experience in applying standard Indonesian to village government administration. Thus, this activity contributed to strengthening the quality of village administration, making it more systematic, formal, and in accordance with standard Indonesian rules.*

**Keywords:** *standard Indonesian; village administration; village documents*

## 1. PENDAHULUAN

Administrasi desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut ketepatan, kejelasan, dan keteraturan dalam penyusunan dokumen resmi. Kualitas administrasi yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pengelolaan administrasi, tetapi juga oleh penggunaan bahasa Indonesia baku dalam setiap dokumen pelayanan publik. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, aparatur desa dituntut mampu menyusun dokumen yang sistematis, informatif, dan sesuai kaidah kebahasaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan akuntabel (Romadhoni & Rodiyah, 2025).

Penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi pemerintahan memiliki landasan yuridis yang kuat. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara (Republik Indonesia, 2009). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang mendukung legalitas, keteraturan, dan profesionalitas tata kelola pemerintahan.

Kualitas administrasi desa juga berkaitan erat dengan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dokumen pelayanan publik yang jelas dan sistematis. Administrasi yang tertib tidak hanya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dokumen resmi. Oleh karena itu, kemampuan kebahasaan aparatur desa menjadi bagian penting dalam mendukung



kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Dalam perspektif linguistik, bahasa administrasi termasuk dalam ragam bahasa resmi yang menuntut penggunaan bahasa baku, objektif, dan sistematis. Alwi et al. (2014) menjelaskan bahwa bahasa baku berfungsi sebagai tolok ukur dalam komunikasi resmi kenegaraan serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen formal. Sejalan dengan itu, Keraf (2004) menegaskan bahwa ketepatan struktur dan pemilihan kata dalam kalimat menjadi faktor penting dalam membangun komunikasi administratif yang efektif dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia baku dalam administrasi desa menjadi bagian penting dalam menciptakan dokumen yang jelas, formal, dan mudah dipahami masyarakat.

Pedoman utama yang digunakan dalam praktik kebahasaan resmi adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pedoman tersebut mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan unsur serapan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen resmi pemerintahan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Keberadaan EYD menjadi acuan penting dalam menjaga keseragaman dan ketepatan bahasa pada administrasi pemerintahan desa.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala. Zawarnis (2020) menemukan bahwa surat dinas instansi pemerintah daerah masih mengandung kesalahan pada penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, dan tanda baca. Penelitian Karmizi

et al. (2023) juga menunjukkan bahwa surat dinas di kantor camat masih sarat dengan kesalahan ejaan dan ketidaksesuaian penggunaan bahasa baku. Temuan serupa disampaikan oleh Sari dan Purwani (2023) yang menunjukkan adanya kesalahan berbahasa dalam surat-menyurat di kantor kelurahan yang berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pelayanan administrasi.

Tidak hanya pada aspek ejaan, kesalahan kebahasaan juga ditemukan pada penggunaan diksi dan penyusunan kalimat efektif. Puspita dan Purwani (2022) menemukan berbagai kesalahan morfologis dan sintaksis dalam surat-menyurat di kantor kelurahan. Sementara itu, Meidiana et al. (2022) menunjukkan bahwa dokumen administrasi desa masih banyak mengandung kalimat tidak efektif dan penggunaan istilah administratif yang tidak konsisten. Fauziah et al., (2023) menegaskan bahwa kualitas bahasa dalam dokumen resmi turut memengaruhi profesionalitas dan kredibilitas lembaga pemerintahan di mata masyarakat.

Berdasarkan observasi awal di Desa Naga Timbul, ditemukan bahwa dokumen administrasi seperti surat pengantar, surat keterangan, dan surat undangan masih mengandung berbagai kesalahan kebahasaan. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, penulisan kata depan yang tidak sesuai kaidah, penggunaan istilah tidak baku, serta penyusunan kalimat yang kurang efektif. Selain itu, belum adanya standar penulisan yang konsisten menyebabkan variasi bentuk bahasa dalam dokumen administratif yang serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam administrasi desa belum diterapkan secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya upaya penguatan penggunaan



bahasa Indonesia baku dalam administrasi desa melalui kegiatan pendampingan dan praktik penyusunan dokumen resmi. Penguatan kemampuan kebahasaan aparatur desa menjadi penting untuk mendukung kualitas pelayanan administrasi yang lebih sistematis, jelas, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kualitas dokumen administrasi juga dapat mendukung tertib administrasi pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi dan pendampingan penggunaan bahasa Indonesia baku dalam penyusunan dokumen administrasi desa. Kegiatan ini mencakup pengenalan kaidah kebahasaan, identifikasi kesalahan umum dalam dokumen administrasi, serta praktik revisi dokumen sesuai kaidah EYD dan KBBI. Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur Desa Naga Timbul mampu menyusun dokumen administrasi yang lebih sistematis, formal, dan sesuai standar bahasa Indonesia baku sehingga dapat mendukung kualitas administrasi pemerintahan desa yang lebih baik.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan partisipatif dengan pendekatan deskriptif-evaluatif. Metode ini dipilih untuk mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia baku dalam dokumen administrasi desa melalui kegiatan sosialisasi, praktik penyusunan dokumen, pendampingan revisi dokumen, dan evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui keterlibatan langsung aparatur desa dalam setiap tahapan kegiatan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu

menerapkan kaidah bahasa Indonesia baku dalam administrasi pemerintahan desa.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Naga Timbul dengan melibatkan aparatur desa yang bertugas dalam pelayanan dan penyusunan dokumen administrasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu observasi awal, sosialisasi, praktik dan pendampingan, serta evaluasi. Tahap observasi awal dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen administrasi desa, khususnya pada surat pengantar, surat keterangan, surat undangan, dan berita acara. Hasil observasi menunjukkan masih ditemukannya berbagai kesalahan kebahasaan, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, kesalahan penulisan kata depan, penggunaan istilah tidak baku, serta penyusunan kalimat yang kurang efektif.

Tahap sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Materi yang diberikan meliputi penggunaan huruf kapital, penulisan kata, tanda baca, pemilihan diksi, dan penyusunan kalimat efektif dalam dokumen administrasi desa. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara partisipatif melalui presentasi, diskusi, dan tanya jawab agar peserta dapat memahami berbagai bentuk kesalahan kebahasaan yang sering ditemukan dalam administrasi desa.

Tahap berikutnya adalah praktik dan pendampingan penyusunan dokumen administrasi. Pada tahap ini, peserta diminta mengidentifikasi kesalahan kebahasaan dalam beberapa contoh dokumen administrasi desa, kemudian melakukan revisi secara kolaboratif dengan



pendampingan langsung dari tim pengabdian. Pendampingan difokuskan pada perbaikan ejaan, penggunaan kata baku, dan penyusunan kalimat efektif sesuai kaidah bahasa Indonesia baku.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan analisis dokumen. Observasi digunakan untuk melihat keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen administrasi sebelum dan sesudah pendampingan. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan kebahasaan pada aspek ejaan, diksi, dan kalimat efektif.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan analisis komparatif terhadap dokumen administrasi sebelum dan sesudah pendampingan. Evaluasi difokuskan pada perubahan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen administrasi desa. Dokumen hasil revisi dibandingkan dengan dokumen awal untuk mengidentifikasi penurunan jumlah kesalahan kebahasaan pada setiap kategori. Indikator evaluasi meliputi ketepatan penggunaan ejaan, penggunaan kata baku, dan penyusunan kalimat efektif. Hasil evaluasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis kesalahan dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai indikator efektivitas kegiatan dalam mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia baku pada dokumen administrasi desa.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori kesalahan kebahasaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan kualitas dokumen administrasi desa setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Tahap Sosialisasi dan Penyampaian Materi

Tahap sosialisasi dan penyampaian materi merupakan bagian awal dari pelaksanaan kegiatan pengabdian yang bertujuan membangun pemahaman konseptual aparatur desa mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam dokumen administrasi. Kegiatan ini dirancang sebagai proses edukatif yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis tentang peran bahasa dalam tata kelola pemerintahan desa.

Tahap sosialisasi dan penyampaian materi merupakan bagian awal dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam dokumen administrasi desa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya awal untuk memperkuat kualitas administrasi pemerintahan desa melalui penggunaan bahasa yang sistematis, jelas, dan sesuai kaidah kebahasaan.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang wajib digunakan dalam dokumen resmi pemerintahan. Penjelasan difokuskan pada pentingnya penggunaan bahasa baku dalam administrasi publik agar dokumen yang dihasilkan memiliki kejelasan informasi, konsistensi penulisan, dan profesionalitas administratif. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai hubungan antara kualitas bahasa dalam dokumen administrasi dengan tertib administrasi pemerintahan desa.

Materi sosialisasi mencakup penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, penggunaan tanda baca, pemilihan kata



baku, dan penyusunan kalimat efektif berdasarkan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam penyampaian materi, tim pengabdian menggunakan contoh-contoh dokumen administrasi desa yang selama ini digunakan oleh aparat desa sehingga peserta dapat memahami bentuk kesalahan secara kontekstual.

Metode penyampaian materi dilakukan secara partisipatif melalui presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Aparatur desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan dokumen administrasi, khususnya terkait penggunaan bahasa resmi dalam surat-menyurat desa. Interaksi tersebut membantu tim pengabdian menyesuaikan materi dengan kebutuhan administrasi desa yang sebenarnya.



Gambar 1. Sosialisasi dan Penyampaian Materi

Secara umum, tahap sosialisasi memberikan landasan awal bagi aparat desa mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia baku dalam administrasi pemerintahan desa. Kegiatan ini juga menjadi dasar sebelum peserta memasuki tahap praktik dan pendampingan penyusunan dokumen administrasi.

### 3.2. Tahapan Praktik dan Pendampingan Penyusunan Dokumen

Tahap praktik dan pendampingan dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman peserta melalui penerapan langsung dalam penyusunan dan revisi dokumen administrasi desa. Pendekatan yang digunakan bersifat aplikatif dan partisipatif agar aparat desa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan kaidah bahasa Indonesia baku dalam dokumen resmi.

Kegiatan diawali dengan pembagian beberapa contoh dokumen administrasi desa yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung kesalahan kebahasaan. Dokumen tersebut meliputi surat keterangan, surat undangan resmi, dan berita acara. Peserta diminta membaca dokumen secara cermat dan mengidentifikasi kesalahan yang ditemukan pada aspek ejaan, diksi, dan kalimat efektif.

Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan bentuk kesalahan dan menyusun perbaikan dokumen secara bersama-sama. Diskusi kelompok dilakukan untuk membangun kemampuan analisis kebahasaan serta meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses revisi dokumen administratif.

Tim pengabdian kemudian melakukan pendampingan langsung selama proses revisi dokumen berlangsung. Pendampingan difokuskan pada penggunaan ejaan sesuai EYD, pemilihan kata baku, dan penyusunan kalimat efektif yang jelas serta tidak menimbulkan multitafsir. Setiap kelompok mempresentasikan hasil revisi dokumen untuk memperoleh umpan balik dan klarifikasi dari tim pengabdian.

Melalui proses praktik dan pendampingan ini, aparat desa dapat

memahami perbedaan antara dokumen sebelum dan sesudah revisi. Peserta juga memperoleh pengalaman langsung dalam menyusun dokumen administrasi yang lebih sistematis, jelas, dan sesuai standar bahasa administrasi pemerintahan.



Gambar 2. Praktik dan Pendampingan Penyusunan Dokumen

Pada akhir kegiatan dilakukan refleksi bersama untuk mengevaluasi hasil revisi dokumen dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam penyusunan administrasi desa. Hasil refleksi menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa mulai mampu mengidentifikasi kesalahan sederhana, terutama pada penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan pemilihan kata baku dalam dokumen administrasi.

### 3.3. Evaluasi Perubahan Dokumen Administrasi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui analisis komparatif terhadap dokumen administrasi desa sebelum dan sesudah pendampingan. Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu ejaan, diksi, dan kalimat efektif. Dokumen yang dianalisis meliputi surat keterangan, surat undangan resmi, dan berita acara yang digunakan dalam administrasi desa.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, dokumen administrasi desa masih menunjukkan berbagai kesalahan kebahasaan, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, kesalahan penulisan kata depan, penggunaan istilah tidak baku, serta penyusunan kalimat yang kurang efektif. Setelah dilakukan sosialisasi, praktik, dan pendampingan revisi dokumen, jumlah kesalahan pada setiap kategori mengalami penurunan.

Tabel 1. Evaluasi Pendampingan

Jenis Kesalahan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Penurunan
Ejaan	32	11	65,6%
Diksi	21	7	66,7%
Kalimat efektif	26	9	65,4%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>65,8%</b>

Berdasarkan Tabel 1, penurunan kesalahan terjadi pada seluruh aspek kebahasaan. Penurunan terbesar ditemukan pada aspek diksi, sedangkan aspek ejaan dan kalimat efektif juga menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas dokumen administrasi desa setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan.

Penurunan jumlah kesalahan pada seluruh aspek menunjukkan bahwa praktik revisi dokumen secara langsung lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata. Pendekatan partisipatif memungkinkan aparatur desa memahami bentuk kesalahan kebahasaan berdasarkan dokumen yang digunakan dalam administrasi sehari-hari sehingga proses perbaikan menjadi lebih kontekstual dan mudah diterapkan. Temuan ini



menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi desa melalui penggunaan bahasa Indonesia baku yang lebih konsisten.

Selain penurunan jumlah kesalahan, hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa aparatur desa mulai mampu mengidentifikasi kesalahan sederhana secara mandiri, terutama pada penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan pemilihan kata baku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada perbaikan dokumen administratif, tetapi juga memberikan pengalaman aplikatif dalam penggunaan bahasa Indonesia baku pada administrasi pemerintahan desa.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan bahasa Indonesia baku memberikan kontribusi positif terhadap kualitas dokumen administrasi desa di Desa Naga Timbul. Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap dokumen sebelum dan sesudah pendampingan, ditemukan penurunan kesalahan kebahasaan pada aspek ejaan, diksi, dan kalimat efektif. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen administrasi desa setelah kegiatan sosialisasi dan praktik revisi dokumen dilaksanakan.

Pendekatan partisipatif melalui praktik revisi dokumen secara langsung memberikan pengalaman aplikatif bagi aparatur desa dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia baku pada administrasi pemerintahan desa. Selain mendukung penyusunan dokumen yang lebih sistematis dan formal, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap tertib administrasi pemerintahan desa yang lebih baik.

Berdasarkan hasil kegiatan, pemerintah desa disarankan untuk menyusun pedoman administrasi yang mengacu pada kaidah bahasa Indonesia baku dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebagai standar internal penyusunan dokumen resmi. Selain itu, kegiatan pendampingan dan evaluasi kebahasaan secara berkala perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi penggunaan bahasa dalam administrasi desa. Kerja sama berkelanjutan dengan perguruan tinggi juga perlu dipertahankan sebagai upaya penguatan kualitas administrasi pemerintahan desa secara berkelanjutan.

#### 5. REFERENSI

- Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2014). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia (Edisi keempat)*. Balai Pustaka.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fauziah Hindasah, A., Genuita, N. A., Mulyati, R. S., & Rachman, I. F. (2023). Analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam surat dinas di Kecamatan Sindangkasih. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(4), 182–190.  
<https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i4.2422>
- Karmizi, Y., Fikri, H., & Gusnetti. (2023). Kesalahan ejaan Bahasa Indonesia pada surat dinas di Kantor Camat Siulak Mukai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)*, 5(1), 18–26.  
<https://doi.org/10.34012/jbip.v5i1.3274>
- Keraf, G. (2004). *Komposisi: Sebuah pengantar kemahiran bahasa*. Nusa Indah.

	<p><b>Servis : Jurnal Pengabdian dan Layanan Kepada Masyarakat</b></p> <p><a href="https://journal.nacreva.com/index.php/servis/index">https://journal.nacreva.com/index.php/servis/index</a> Volume 04, Nomor 02, Juni 2026, Hal : 87-95 DOI : <a href="https://doi.org/10.58641/servis">https://doi.org/10.58641/servis</a></p>	<p>e-ISSN : 2985-3540</p>
---	---	---------------------------

- Meidiana, R., Suryadi, S., & Basuki, R. (2022). Analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam penulisan surat dinas Kantor Desa se-Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 6(1), 85–94. <https://doi.org/10.33369/jik.v6i1.19812>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Romadhoni, M. N., & Rodiyah, I. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Larangan. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/10.22219/SW.V13I1.8954>
- Sari, A. P. I., & Purwani, R. S. (2023). Analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam surat-menyurat di Kantor Kelurahan Ringin Harjo Kabupaten Banyuasin. *Jurnal KIBASP*, 7(1), 137–153. <https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i1.7219>
- Puspita Sari, A. I., & Purwani, R. S. (2022). Analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam surat-menyurat di kantor kelurahan. *Jurnal KIBASP*, 6(2), 98–110.
- Zawarnis, Y. (2020). Kesalahan berbahasa dalam surat dinas instansi pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan. *Kelasa*, 15(1), 23–35.

